

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
INTISARI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum tentang Kedudukan Menteri dalam Sistem Hukum Indonesia	19
B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Perundang-Undangan	24
C. Tinjauan Umum tentang Pengujian Peraturan Perundang- Undangan	28
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Sifat Penelitian	40
B. Bahan Penelitian	41

C. Jalannya Penelitian	44
D. Analisis Hasil Penelitian	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Mekanisme Formal Pembentukan dan Formulasi Substansi Peraturan Menteri dalam Sistem Hukum Indonesia	48
1. Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Menteri dalam Sistem Hukum Indonesia	48
2. Mekanisme Formal Pembentukan Peraturan Menteri dalam Sistem Hukum Indonesia	58
a. Kewenangan Pembentukan Peraturan Menteri	58
b. Prosedur Pembentukan Peraturan Menteri	74
B. Persetujuan Presiden sebagai Mekanisme <i>Executive Preview</i> Diatur dan Digunakan dalam Proses Pembentukan Peraturan Menteri	90
1. Latar Belakang Pemberian Persetujuan Presiden sebagai Mekanisme <i>Executive Preview</i> dalam Pembentukan Peraturan Menteri	90
2. Prosedur Persetujuan Presiden sebagai Mekanisme <i>Executive Preview</i> dalam Pembentukan Peraturan Menteri	108
C. Penataan Ideal Persetujuan Presiden sebagai Mekanisme <i>Executive Preview</i> Terhadap Produk Peraturan Menteri	121
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	133

A. Kesimpulan	133
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	139